

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan di berbagai bidang yang berada di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan konstruksi yang selalu melibatkan penyedia jasa, dalam hal ini kontraktor. Pemahaman mengenai konstruksi dapat dibagi dua kelompok yaitu teknologi konstruksi (*construction teknologi*) dan manajemen konstruksi (*construction management*). Pada umumnya dari berbagai jenis pembangunan konstruksi yang berada di Indonesia, dilaksanakan secara kontraktual. Dengan kontraktual pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas dan administrasi. Secara kontraktual proyek konstruksi yang selama pembangunan yang bersifat dinamis dengan menunjukkan suatu perubahan yang dibutuhkan, baik jenis maupun jumlahnya. Pelaksanaan pembangunan yang terus berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan, perancangan, pelelangan, pelaksanaan, dan operasional. Dengan kontraktual pelaksanaan proyek konstruksi tersebut berorientasi pada penyelesaian proyek sedemikian rupa, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Proyek konstruksi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan berjangka waktu pendek.

Dalam kegiatan proyek konstruksi, perencanaan dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pelaksana pekerjaan dan menjadi standar pelaksanaan proyek meliputi: spesifikasi teknik, jadwal dan anggaran biaya. Sehingga proses tersebut melibatkan, pihak – pihak terkait baik itu secara langsung maupun tak langsung. Kegiatan proyek pembangunan dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam

jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Prasyarat keberhasilan proyek pembangunan adalah tercapainya sasaran proyek, yaitu tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Sedangkan seluruh rencana proyek baik dari tahapan demi tahapan konstruksi dapat berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pembangunan fisik, rancangan pemeliharaan dan pengembangan (peningkatan) terhadap proyek yang telah dibangun, merupakan tugas (tanggung jawab) dan wewenang pemerintah yang menangani proyek tersebut.

Dengan adanya perkembangan pembangunan yang bersifat *top-down* mengakibatkan sikap apatis dari masyarakat. Sehingga pemerintah menumbuhkan gagasan bahwa pembangunan yang ada tersebut melibatkan partisipasi masyarakat atau yang biasa di sebut pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya perkembangan pembangunan di masyarakat yang melalui suatu program pemberdayaan masyarakat dan adanya standart pedoman yang menjadi acuan bagi para pelaksana program dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten bahkan sampai desa-desa sasaran dalam menyelenggarakan program. Salah satu program pemberdayaan yang ada sampai saat ini, adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang diselenggarakan secara berjenjang dan berurutan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta sampai tahap pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dalam pelaksanaan tahapan program harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan dan dilengkapi dengan berbagai buku petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan fisik di lapangan.

Di Indonesia masih terdapat desa – desa yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini meliputi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari beberapa bidang yang harus ditangani, diantaranya adalah

: penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi, penanggulangan kemiskinan bidang sosial, serta penanggulangan kemiskinan bidang infrastrukturnya. Sehingga program – program pemberdayaan yang ada, dalam hal pengentasan kemiskinan di setiap kabupaten di Indonesia antara lain adalah : PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM PPIP, PAMSIMAS, SANIMAS, PPK dan program lainnya. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

Program pemberdayaan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan. Sedangkan dalam pembiayaan BLM tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip – prinsip, maksud dan tujuan dari program tersebut. Sedangkan prinsip – prinsip dari pemberdayaan khususnya PNPM PPIP adalah pemilihan kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah desa dan di terima oleh masyarakat secara luas (*Acceptable*), penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga diketahui semua unsur masyarakat (*Transparent*), kegiatan yang dilakukan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan (*Accountable*), kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat secara berkelanjutan (*Sustainable*).

Sedangkan dalam program pemberdayaan dilakukan adanya pendekatan – pendekatan antara lain : pemberdayaan masyarakat, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan maksud dari program PNPM PPIP ini adalah untuk mengurangi kemiskinan

dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya tujuan dari program pemberdayaan khususnya PPIP antara lain adalah

: untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Pedoman Pelaksanaan 2011). Infrastruktur dasar perdesaan antara lain adalah : transportasi jalan dan sarana pendukungnya, sarana penyediaan irigasi pengairan, serta sarana penyediaan air bersih.

Pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terutama program PPIP oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU), yang dalam hal ini selaku unsur pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan program pemberdayaan dengan keterlibatan masyarakat yang dicanangkan pemerintah ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah perdesaan. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan dan kurang layaknya pelayanan di bidang infrastruktur desa, sehingga ini merupakan tantangan dalam pembangunan nasional. Untuk itu peran serta masyarakat aktif dalam setiap tahapan kegiatan yang berlangsung sangat diperlukan, sehingga maksud, tujuan, dan sasaran program dapat tercapai. PNPM PPIP yang merupakan salah satu program pemberdayaan dan berupaya meningkatkan kualitas masyarakat dan peran *stakeholder*. Sedangkan hal-hal tersebut dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui pelaksanaan *Public Awareness Campaign* (PAC) yang optimal.
2. Peningkatan kapasitas untuk penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program.

3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa secara *continue*.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta kaum perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan untuk jenis infrastruktur terbangun.
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program.
6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan terhadap pengaduan - pengaduan yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan penjabaran di atas, maka pelaksanaan proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 2 cara yaitu pelaksanaan proyek konstruksi secara kontraktual dan secara pemberdayaan masyarakat. Dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya faktor-faktor yang dipertimbangkan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, efektif dan efisien. Sehingga sangat penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memilih pelaksanaan konstruksi yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan faktor pertimbangan lain.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proyek konstruksi berbasis kontraktual dan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menentukan faktor-faktor penting dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Menentukan bobot kriteria dan sub kriteria di antara sejumlah alternatif

dengan metode

*Analytical Hierarchy Process (AHP).*

3. Memilih pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontraktual atau cara pemberdayaan masyarakat dengan metode AHP.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini terfokuskan pada hal – hal sebagai berikut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan ini dibatasi pada proyek konstruksi secara kontrak dan proyek konstruksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian ini dibatasi pada proyek konstruksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan dari tahun 2007 sampai 2011 dengan proyek konstruksi pada tahun yang sama.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Memberikan gambaran evaluasi kinerja proyek konstruksi yang dilakukan secara kontraktual dan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai bahan pembandingan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang akan dilakukan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Rancangan sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 6 bab, dimana uraian untuk masing-masing bab antara lain adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang pengambilan tema penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah proyek konstruksi secara kontraktual dengan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat, AHP (*Analythical Hierarchy Process*).

### **BABIII : METODEPENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian, tahapan penelitian, sumber data, objek penelitian, pengumpulan data dan pembahasan data, dan tahapan analisis data dan validasi hasil analisis AHP (*Analythical Hierarchy Process*).

### **BABIV : DATA DANANALISIS**

Bab ini berisi tentang diskripsi responden penelitian yang mencakup pendidikan responden dan pengalaman responden, *Project Life Cycle*, analisis hierarki metode evaluasi proyek konstruksi yang mencakup *decompisian* dan perbandingan berpasangan (*Pairwase Comparison*),

hasil interview data hasil analisis pada pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

### **BABV :PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang tahapan – tahapan pelaksanaan proyek konstruksi, skala prioritas dari responden, dan validasi metode analisis *Analythical Hierarki Process* (AHP).

### **BABVI : KESIMPULAN DANSARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang ada dan saran – saran.